



Integrasi Perlindungan Sosial dan Keberlanjutan Pendidikan Anak Rentan: Perbandingan DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur

Raka Aditya Pranowo¹

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Universitas Indonesia

Email: raka.apranowo@ui.ac.id

Phone Number : +6285-xxxx-xxxx (For send LoA)

Abstract (English) :

The educational sustainability of children from vulnerable families is determined not only by the availability of school tuition assistance, but also by the institutional capacity to link social protection, psychosocial support, family mentoring, and education services. This study analyzes how variations in institutional capacity influence the effectiveness of social protection and education integration in the provinces of DKI Jakarta and East Nusa Tenggara. The study uses a qualitative comparative case study utilizing official statistics, planning documents, regulations, program reports, and research findings from 2020–2025. The results show that DKI Jakarta has a more layered assistance architecture through a combination of national programs and regional education assistance, supported by relatively stronger fiscal capacity, service density, and administrative infrastructure. In contrast, East Nusa Tenggara faces multidimensional poverty, geographic barriers, limited services, and greater dependence on national programs. These differences are reflected in the gap in educational participation among the 16–18 age group. However, both cases demonstrate a similar weakness: the lack of institutionalization of school-based social work as a case management system that integrates economic, family, psychosocial, and educational issues. This research develops a socio-educational integration capacity model that explains that the impact of assistance is mediated by data synchronization, cross-sector coordination, benefit continuity, family capacity, and children's attachment to school. Policy implications emphasize the need for area-based socio-educational service teams, strengthened active outreach, and differentiated intervention designs based on the depth of vulnerability and geographic conditions.

Keywords: school-based social work; multidimensional poverty; family resilience; collaborative governance; child welfare

Abstrak (Indonesia)

Keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga rentan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan biaya sekolah, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan untuk menghubungkan perlindungan sosial, dukungan psikososial, pendampingan keluarga, dan pelayanan pendidikan. Penelitian ini menganalisis bagaimana variasi kapasitas kelembagaan memengaruhi efektivitas integrasi perlindungan sosial dan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan



studi kasus komparatif kualitatif dengan memanfaatkan statistik resmi, dokumen perencanaan, peraturan, laporan program, dan hasil penelitian periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki arsitektur bantuan yang lebih berlapis melalui kombinasi program nasional dan bantuan pendidikan daerah, didukung kapasitas fiskal, kepadatan layanan, dan infrastruktur administratif yang relatif lebih kuat. Sebaliknya, Nusa Tenggara Timur menghadapi kemiskinan multidimensional, hambatan geografis, keterbatasan layanan, dan ketergantungan lebih besar pada program nasional. Perbedaan tersebut tercermin dalam kesenjangan partisipasi pendidikan pada kelompok usia 16–18 tahun. Akan tetapi, kedua kasus memperlihatkan kelemahan serupa, yaitu belum terlembaganya pekerjaan sosial berbasis sekolah sebagai sistem manajemen kasus yang mengintegrasikan masalah ekonomi, keluarga, psikososial, dan pendidikan. Penelitian ini mengembangkan model kapasitas integrasi sosial-pendidikan yang menjelaskan bahwa dampak bantuan dimediasi oleh sinkronisasi data, koordinasi lintas sektor, kesinambungan manfaat, kapasitas keluarga, dan keterikatan anak terhadap sekolah. Implikasi kebijakan menekankan perlunya tim layanan sosial-pendidikan berbasis wilayah, penguatan penjangkauan aktif, dan diferensiasi desain intervensi berdasarkan kedalaman kerentanan serta kondisi geografis.

Kata Kunci: pekerjaan sosial berbasis sekolah; kemiskinan multidimensional; ketahanan keluarga; tata kelola kolaboratif; kesejahteraan anak

Pendahuluan

Ketimpangan pendidikan tetap menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari ketimpangan sosial global. Kemajuan dalam perluasan akses pendidikan dasar belum sepenuhnya menghilangkan eksklusi yang dialami anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, komunitas terpencil, rumah tangga migran, dan kelompok yang menghadapi diskriminasi sosial. *Global Education Monitoring Report* mencatat bahwa sekitar 251 juta anak dan remaja masih berada di luar sekolah pada 2023, sementara penurunan jumlah anak tidak bersekolah sejak 2015 berlangsung sangat lambat. Ketimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga dengan perbedaan kemampuan keluarga memenuhi biaya langsung dan tidak langsung pendidikan, kualitas pelayanan publik, keamanan lingkungan belajar, kesehatan mental, serta kemampuan negara mendeteksi kerentanan sebelum anak meninggalkan pendidikan. Dengan demikian, eksklusi pendidikan merupakan keluaran dari interaksi antara kemiskinan, struktur keluarga, kondisi komunitas, tata kelola pelayanan sosial, dan kapasitas kelembagaan pendidikan, bukan semata-mata keputusan individual untuk bersekolah atau tidak bersekolah (UNESCO, 2024).

Perspektif tersebut menempatkan pekerjaan sosial dan pendidikan dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan memang memiliki fungsi pedagogis, tetapi keberhasilan proses pembelajaran bergantung pada terpenuhinya kebutuhan sosial, material, emosional, dan relasional peserta didik. Anak yang



menghadapi ketidakstabilan pendapatan keluarga, kekerasan domestik, pengasuhan yang terbatas, pekerjaan anak, perkawinan usia dini, disabilitas, perundungan, atau gangguan kesehatan mental tidak dapat dilayani secara memadai hanya melalui intervensi instruksional. Dalam kerangka *person-in-environment*, perilaku dan capaian pendidikan perlu dipahami sebagai hasil hubungan dinamis antara individu dan lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, kebijakan, serta struktur sosial yang lebih luas (Bronfenbrenner, 1979; Payne, 2020). Pekerjaan sosial berbasis sekolah karena itu tidak identik dengan pemberian konseling setelah masalah terjadi, melainkan meliputi deteksi dini, asesmen ekologis, advokasi hak anak, manajemen kasus, intervensi keluarga, pengorganisasian komunitas, dan koordinasi rujukan.

Urgensi integrasi tersebut sangat menonjol dalam konteks Indonesia. Analisis kemiskinan anak berbasis Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 menunjukkan bahwa sekitar 11,78% anak Indonesia atau kurang lebih 9,5 juta anak hidup dalam kemiskinan moneter. Ketika kemiskinan diukur secara multidimensional, proporsinya meningkat menjadi sekitar 37,38% atau hampir 29,7 juta anak. Deprivasi anak di perdesaan juga lebih tinggi daripada di perkotaan, masing-masing sekitar 46,1% dan 30,8%. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga tetap penting, tetapi tidak cukup untuk mengatasi kekurangan yang terjadi secara bersamaan dalam dimensi pendidikan, perumahan, kesehatan, perlindungan, sanitasi, informasi, dan partisipasi sosial. Anak dapat tercatat tidak miskin berdasarkan garis kemiskinan moneter, tetapi tetap mengalami ketidakmampuan mengakses transportasi, perangkat belajar, layanan disabilitas, dukungan psikososial, atau lingkungan pendidikan yang aman (Bappenas, BPS, & UNICEF, 2024).

Perbedaan regional memperlihatkan bahwa kerentanan tersebut tidak terdistribusi secara seragam. DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur merupakan dua kasus yang berada dalam sistem kebijakan nasional yang sama, tetapi memiliki konfigurasi kemiskinan, kapasitas fiskal, geografis, dan kelembagaan yang sangat berbeda. Pada September 2024, persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tercatat sekitar 4,14%, sedangkan Nusa Tenggara Timur mencapai 19,02%. Kesenjangan serupa terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia 2024, yakni 84,15 di DKI Jakarta dan 69,14 di Nusa Tenggara Timur. Analisis kemiskinan anak multidimensional bahkan menunjukkan bahwa deprivasi anak di Nusa Tenggara Timur mencapai sekitar 78,02%, yang berarti kerentanan tidak hanya bersifat lebih luas, tetapi juga melibatkan beberapa dimensi secara bersamaan. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan satu provinsi sebagai model sederhana bagi provinsi lain. Sebaliknya, perbandingan digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan nasional yang serupa menghasilkan capaian berbeda ketika beroperasi dalam kedalaman kemiskinan, aksesibilitas wilayah, kapasitas pemerintah daerah, dan jaringan pelayanan yang tidak setara (Bappenas, BPS, & UNICEF, 2024; BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025; BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025b).



Perbedaan kondisi sosial tersebut berhubungan erat dengan keberlanjutan pendidikan. Pada kelompok usia pendidikan dasar, angka partisipasi sekolah di kedua wilayah relatif tinggi. Namun, kesenjangan menjadi lebih nyata ketika anak memasuki kelompok usia 16–18 tahun, yaitu tahap ketika biaya transportasi, kebutuhan bekerja, tanggung jawab keluarga, aspirasi pendidikan, ketersediaan sekolah menengah, dan risiko perkawinan anak mulai berinteraksi. Statistik pendidikan 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah kelompok usia 16–18 tahun di DKI Jakarta berada pada kisaran 86,78%, sedangkan di Nusa Tenggara Timur sekitar 75,75%. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa universalitas pada pendidikan dasar tidak otomatis berlanjut pada pendidikan menengah. Transisi antartingkat merupakan titik kritis ketika perlindungan sosial perlu bekerja bersama dengan pendampingan keluarga, orientasi pendidikan, layanan psikososial, transportasi, dan ketersediaan satuan pendidikan yang dapat dijangkau (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024; BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025a).

Indonesia telah mengembangkan sejumlah instrumen untuk mengurangi hambatan ekonomi pendidikan. Program Indonesia Pintar memberikan bantuan tunai kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan, sedangkan Program Keluarga Harapan menghubungkan bantuan sosial bersyarat dengan pemanfaatan layanan pendidikan dan kesehatan. Pada 2024, Program Indonesia Pintar menjangkau sekitar 18,59 juta peserta didik dengan anggaran sekitar Rp13,45 triliun. DKI Jakarta melengkapi program nasional tersebut melalui Kartu Jakarta Pintar Plus. Pada tahap kedua 2024, Kartu Jakarta Pintar Plus dilaporkan mencakup 523.622 peserta didik dari pendidikan dasar hingga pendidikan kesetaraan, sedangkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul mencakup 15.648 mahasiswa. Kehadiran lapisan pembiayaan daerah memperluas kemampuan pemerintah DKI Jakarta menanggung kebutuhan pendidikan yang tidak sepenuhnya dicakup program nasional. Akan tetapi, keterlambatan verifikasi dan penyaluran pada periode tertentu juga menunjukkan bahwa keluasannya tetap bergantung pada validitas data, prosedur administrasi, dan kesinambungan keputusan kelembagaan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024).

Di Nusa Tenggara Timur, kebijakan pendidikan daerah beroperasi dengan ketergantungan yang lebih besar terhadap Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Dana Alokasi Khusus, dan program perlindungan sosial nasional. Dokumen perencanaan pendidikan daerah mengidentifikasi perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga pendidikan, kesejahteraan guru, sarana-prasarana, dan tata kelola sebagai agenda yang harus dijalankan secara bersamaan. Ketergantungan pada transfer nasional tidak dengan sendirinya menjadi kelemahan, tetapi mempersempit ruang fleksibilitas daerah untuk memberikan tambahan bantuan yang disesuaikan dengan biaya transportasi antarpulau, keterpencilan desa, keterbatasan jaringan digital, dan tipologi mata pencaharian keluarga. Kajian Bank Dunia mengenai



inklusi perlindungan sosial di wilayah terpencil Indonesia juga memperlihatkan bahwa jarak, biaya akses, dokumentasi kependudukan, keterbatasan layanan, dan kesenjangan informasi dapat mengurangi kemampuan rumah tangga memperoleh manfaat program meskipun secara substantif memenuhi kriteria (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023; World Bank, 2024).

Dalam teori pembangunan sosial, bantuan pendidikan tidak seharusnya dipahami sebagai pengeluaran konsumtif yang berdiri sendiri. Bantuan merupakan investasi sosial apabila mampu meningkatkan kapabilitas anak, mengurangi paparan terhadap risiko, memperkuat daya lenting keluarga, dan membuka peluang mobilitas sosial dalam jangka panjang (Midgley, 2014; Sen, 1999). Namun, konversi bantuan menjadi kapabilitas tidak berlangsung secara otomatis. Nilai bantuan yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda karena keluarga menghadapi kebutuhan, biaya, informasi, jaringan dukungan, dan kualitas layanan pendidikan yang berbeda. Seorang anak di wilayah perkotaan mungkin menghadapi biaya perumahan, tekanan kerja informal orang tua, perundungan, atau fragmentasi pengasuhan. Anak di wilayah kepulauan mungkin menghadapi jarak sekolah, keterbatasan transportasi, kekurangan guru, konektivitas rendah, dan kalender ekonomi rumah tangga yang dipengaruhi musim. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan sosial bergantung pada kecocokan antara instrumen program dan struktur kerentanan yang dialami penerima manfaat.

Literatur mengenai bantuan tunai bersyarat umumnya menunjukkan dampak positif terhadap partisipasi sekolah, penggunaan layanan kesehatan, dan akumulasi modal manusia, tetapi besarnya dampak sangat bervariasi. Tinjauan Bastagli et al. (2019) menemukan bahwa transfer tunai cenderung meningkatkan penggunaan layanan dasar dan mengurangi sejumlah bentuk deprivasi, meskipun hasil dipengaruhi desain program, besaran manfaat, kualitas pasokan layanan, dan karakteristik rumah tangga. Kajian sistematis Das dan Sethi (2023) juga memperlihatkan dominasi hasil positif terhadap pendidikan dan kesehatan anak, tetapi menegaskan bahwa bantuan dari sisi permintaan kehilangan efektivitas ketika sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, atau kualitas pelayanan tidak tersedia secara memadai. Dengan demikian, transfer tunai merupakan kondisi penting, tetapi bukan kondisi yang mencukupi bagi pencapaian hasil pendidikan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai Program Keluarga Harapan. Cahyadi et al. (2020) menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap bantuan tunai bersyarat di Indonesia menghasilkan perbaikan kumulatif dalam sejumlah keluaran kesehatan dan pendidikan. Hadna dan Kartika (2017), di sisi lain, memperlihatkan bahwa peningkatan kepesertaan dan kehadiran sekolah tidak selalu diikuti secara langsung oleh peningkatan prestasi akademik. Hartarto dan Wardani (2023) menambahkan bahwa bantuan tunai dapat memengaruhi aspirasi pendidikan, tetapi pengaruh tersebut tetap berhubungan dengan pendidikan orang tua, informasi, dan lingkungan sosial. Variasi temuan ini mengindikasikan perbedaan antara akses



formal, kehadiran, kualitas keterlibatan dalam pembelajaran, dan kemampuan menuntaskan pendidikan. Program dapat berhasil mengurangi biaya masuk sekolah, namun belum tentu mengatasi stres keluarga, defisit pembelajaran, stigma sosial, atau rendahnya ekspektasi pendidikan.

Penelitian mengenai pekerjaan sosial berbasis sekolah menawarkan penjelasan terhadap ruang intervensi yang tidak dapat dipenuhi bantuan tunai. Pekerja sosial sekolah menjalankan fungsi penghubung antara anak, keluarga, sekolah, sistem perlindungan anak, layanan kesehatan mental, dan sumber daya komunitas. Tinjauan Ding et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik tersebut semakin ditempatkan dalam sistem dukungan bertingkat, mulai dari pencegahan universal, intervensi kelompok berisiko, hingga manajemen kasus intensif. Akan tetapi, efektivitasnya dipengaruhi rasio tenaga profesional, kejelasan mandat, integrasi dengan proses pendidikan, dan kemampuan menggunakan data untuk deteksi dini. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 telah menyediakan dasar bagi standar praktik, pendidikan profesi, registrasi, dan tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan pekerjaan sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 juga menegaskan kewajiban perlindungan khusus dan penyediaan layanan bagi anak yang menghadapi situasi rentan. Meskipun demikian, dasar hukum tersebut belum secara otomatis menghasilkan penempatan pekerja sosial profesional sebagai bagian baku dari tata kelola sekolah (Ding et al., 2023; Republik Indonesia, 2019, 2021).

Kajian kelembagaan memperlihatkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada jumlah program, tetapi pada bagaimana program dikategorikan, dikoordinasikan, dan dipertanggungjawabkan. Sutiyo (2023) menunjukkan bahwa evolusi perlindungan sosial Indonesia dipengaruhi aturan formal, norma birokrasi, distribusi kewenangan, dan ketergantungan jalur kelembagaan. McLaren, Qonitah, dan Widianingsih (2022) menyoroti bahwa administrasi kesejahteraan berbasis insentif dapat menghasilkan perluasan kepesertaan, tetapi juga berisiko mereduksi persoalan kompleks perempuan dan anak menjadi pemenuhan indikator administratif. McCarthy et al. (2024) lebih jauh memperlihatkan bahwa praktik pengukuran dan kategorisasi kemiskinan bukan proses netral; kategori penerima manfaat dapat menentukan siapa yang terlihat oleh sistem dan siapa yang tetap berada di luar jangkauan. Literatur tersebut menggeser perhatian dari pertanyaan “apakah bantuan tersedia” menuju “bagaimana institusi mengenali kebutuhan, menghubungkan layanan, serta mengubah sumber daya menjadi hasil sosial dan pendidikan.”

Dari perspektif tata kelola kolaboratif, fragmentasi muncul ketika dinas pendidikan berorientasi pada kehadiran, sarana, kurikulum, dan capaian belajar, sedangkan dinas sosial berorientasi pada kelayakan penerima, penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan perlindungan. Organisasi sekolah, pemerintah desa atau kelurahan, layanan kesehatan, unit perlindungan perempuan dan anak, serta organisasi masyarakat juga memiliki basis data dan mandat masing-masing. Tanpa forum bersama, prosedur



rujukan, dan akuntabilitas lintas organisasi, anak dengan persoalan multidimensional harus berhadapan dengan sistem yang terpisah-pisah. Ansell dan Gash (2008) serta Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menjelaskan bahwa kolaborasi tidak cukup dibangun melalui pertemuan koordinasi. Kolaborasi memerlukan tujuan bersama, kepemimpinan fasilitatif, distribusi peran, pertukaran informasi, kapasitas bertindak bersama, dan mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan.

Dokumen penganggaran sosial bagi anak di Indonesia menunjukkan bahwa kompleksitas pembagian urusan antartingkat pemerintahan, ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran, serta lemahnya hubungan antara indikator kinerja dan hasil kesejahteraan masih membatasi konsistensi kebijakan lintas sektor. Dalam konteks pendidikan anak rentan, keterbatasan ini dapat menghasilkan tiga bentuk diskontinuitas. Pertama, anak yang memenuhi kriteria substantif tidak tercakup karena masalah data dan administrasi. Kedua, bantuan diterima tetapi tidak disertai layanan keluarga dan psikososial. Ketiga, sekolah mengenali risiko, tetapi tidak memiliki jalur rujukan yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga bentuk tersebut menjelaskan mengapa peningkatan cakupan program tidak selalu berjalan searah dengan pengurangan putus sekolah, perbaikan kesejahteraan psikososial, atau peningkatan capaian belajar (UNICEF Indonesia, 2025).

Kesenjangan penelitian ini terletak pada terbatasnya analisis yang secara simultan menghubungkan perlindungan sosial, pekerjaan sosial berbasis sekolah, kapasitas pemerintah daerah, dan keberlanjutan pendidikan. Penelitian evaluasi bantuan tunai umumnya mengukur dampak rata-rata terhadap kehadiran atau kepesertaan. Kajian pendidikan lebih sering menekankan sarana, guru, kurikulum, atau hasil belajar. Sementara itu, literatur pekerjaan sosial sekolah banyak dikembangkan dalam sistem pendidikan negara yang telah menempatkan pekerja sosial sebagai profesi khusus di lingkungan sekolah. Akibatnya, belum banyak penjelasan mengenai mekanisme yang bekerja ketika bantuan tunai tersedia, tetapi infrastruktur manajemen kasus sosial-pendidikan belum terlembaga.

Kesenjangan empiris dan komparatif juga terlihat pada minimnya perbandingan antara daerah dengan kapasitas fiskal dan kepadatan pelayanan tinggi dan daerah yang menghadapi kemiskinan multidimensional serta hambatan geografis. Analisis agregat nasional cenderung menyamakan fakta bahwa kebijakan yang sama menghadapi biaya implementasi, kualitas layanan, dan pola kerentanan yang berbeda. Kesenjangan metodologis terletak pada kecenderungan memisahkan statistik pendidikan dari dokumen pelayanan sosial, sehingga hubungan antara cakupan bantuan, mekanisme administrasi, dukungan keluarga, dan transisi pendidikan belum dijelaskan sebagai satu rangkaian kausal. Pada tingkat implementasi, belum jelas mengapa lapisan program yang lebih banyak dapat memperkuat keberlanjutan pendidikan di satu wilayah, tetapi belum tentu dapat direplikasi secara mekanis di wilayah lain.



Kebaruan artikel ini terletak pada pengembangan konsep *kapasitas integrasi sosial-pendidikan*, yaitu kemampuan sistem daerah untuk menggabungkan perlindungan pendapatan, deteksi dini, manajemen kasus, dukungan keluarga, layanan psikososial, dan pelayanan sekolah menjadi rangkaian intervensi yang berkesinambungan. Konsep ini membedakan kapasitas programatik—jumlah program dan besaran anggaran—dari kapasitas integratif—kemampuan menghubungkan program sesuai lintasan risiko anak. Artikel ini juga memperlihatkan bahwa hubungan antara perlindungan sosial dan keberlanjutan pendidikan dimediasi oleh sinkronisasi data, penjangkauan aktif, kualitas rujukan, kapasitas keluarga, dan keterikatan anak terhadap sekolah. Dengan demikian, artikel memperluas kajian bantuan sosial dari logika transfer menuju logika konversi sumber daya menjadi kesejahteraan dan kapabilitas pendidikan.

Kerangka analitis penelitian mengikuti hubungan: **kerentanan sosial dan ekonomi → akses terhadap perlindungan sosial → integrasi layanan dan manajemen kasus → penguatan kapasitas keluarga serta dukungan psikososial → keterikatan dan partisipasi pendidikan → kesejahteraan anak dan pembangunan manusia**. Kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, kondisi geografis, kualitas sekolah, dan partisipasi komunitas diposisikan sebagai kondisi yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini berargumen bahwa bantuan biaya pendidikan akan memberikan hasil lebih besar ketika menjadi pintu masuk menuju asesmen keluarga dan layanan pendukung, bukan diperlakukan sebagai intervensi akhir.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana variasi kerentanan, kapasitas kelembagaan, arsitektur perlindungan sosial, dan koordinasi pekerjaan sosial-pendidikan memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak rentan di DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian secara khusus menjelaskan mekanisme yang menghasilkan perbedaan capaian, keterbatasan model intervensi yang dominan, serta kondisi kelembagaan yang diperlukan untuk mengintegrasikan bantuan sosial dengan dukungan keluarga dan pelayanan pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik dengan desain studi kasus komparatif eksplanatoris berbasis data sekunder. Paradigma tersebut dipilih karena penelitian tidak memperlakukan statistik sebagai representasi sempurna dari realitas sosial, melainkan sebagai bukti yang perlu ditafsirkan bersama konteks kebijakan, institusi, dan mekanisme implementasi. Logika perbandingan mengikuti strategi sistem paling berbeda: DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur berada dalam kerangka kebijakan nasional yang sama, tetapi memiliki tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, kapasitas fiskal, kepadatan pelayanan, karakter geografis, dan ruang inovasi kebijakan daerah yang kontras. Unit analisis penelitian adalah sistem integrasi perlindungan sosial dan pendidikan pada tingkat provinsi, sedangkan unit tertanamnya meliputi program bantuan pendidikan, organisasi perangkat daerah,



satuan pendidikan, keluarga penerima manfaat, dan mekanisme rujukan pelayanan anak. Teori ekologis pekerjaan sosial, pembangunan kapabilitas, investasi sosial, dan tata kelola kolaboratif digunakan sebagai perangkat untuk menilai bagaimana kerentanan diterjemahkan menjadi kebutuhan, bagaimana institusi mendistribusikan sumber daya, serta bagaimana sumber daya tersebut dikonversi menjadi partisipasi dan keberlanjutan pendidikan.

Korpus penelitian mencakup statistik kemiskinan, pendidikan, dan pembangunan manusia; dokumen perencanaan daerah; laporan Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Jakarta Pintar Plus, dan pembiayaan sosial anak; peraturan pekerjaan sosial dan perlindungan anak; serta penelitian sejawat periode 2020–2025, dengan 2024 sebagai tahun utama perbandingan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen publik dan dianalisis menggunakan analisis isi terarah serta matriks antarkasus dengan kategori karakteristik kelompok sasaran, bentuk kerentanan, akses pendidikan, akses pelayanan sosial, kapasitas tenaga profesional, model intervensi, koordinasi, dukungan keluarga, partisipasi masyarakat, pembiayaan, kualitas pendampingan, dan hasil sosial-pendidikan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan statistik resmi, dokumen pemerintah, laporan lembaga internasional, dan hasil penelitian independen; konsistensi temporal diperiksa agar data antarkasus berasal dari periode yang sebanding. Kredibilitas diperkuat melalui hierarki sumber dan pencarian bukti yang tidak sejalan dengan argumen awal, dependabilitas melalui pencatatan kategori analisis, konfirmabilitas melalui pemisahan antara data dan inferensi, serta transferabilitas melalui deskripsi kondisi kasus. Penelitian hanya menggunakan data agregat dan dokumen publik sehingga tidak mengumpulkan identitas anak atau keluarga; keterbatasannya adalah ketidakmampuan mengestimasi efek kausal individual, menilai kualitas hubungan pendampingan secara langsung, dan menangkap variasi intraprovinci yang mungkin tersembunyi di balik indikator agregat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Karakteristik Kerentanan Sosial dan Transisi Pendidikan

Perbandingan kedua kasus memperlihatkan bahwa kerentanan pendidikan memiliki bentuk, kedalaman, dan mekanisme yang berbeda. DKI Jakarta menghadapi tingkat kemiskinan agregat lebih rendah, tetapi biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan informal, kepadatan hunian, migrasi, keterputusan pengasuhan, dan ketimpangan antarwilayah menghasilkan kelompok anak yang tetap berisiko meskipun tinggal di wilayah dengan infrastruktur pelayanan relatif lengkap. Kerentanan perkotaan bersifat terkonsentrasi dan dapat tersembunyi di balik indikator rata-rata yang tinggi. Keluarga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat mengalami guncangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, kenaikan biaya sewa, penyakit, atau perpisahan orang tua yang dengan cepat mengganggu pendidikan anak. Karena itu, rendahnya persentase



kemiskinan tidak menghilangkan kebutuhan terhadap sistem deteksi dini yang mampu mengenali kerentanan dinamis.

Di Nusa Tenggara Timur, kerentanan lebih sering bersifat multidimensional dan teritorial. Tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi berinteraksi dengan jarak antardesa, sebaran pulau, keterbatasan transportasi, akses digital, ketersediaan sekolah menengah, dan distribusi tenaga pendidikan. Besarnya deprivasi multidimensional anak menunjukkan bahwa masalah pendidikan berkelindan dengan perumahan, sanitasi, kesehatan, gizi, perlindungan, dan akses informasi. Dalam situasi demikian, bantuan untuk membeli perlengkapan sekolah dapat mengurangi satu hambatan, tetapi tidak mengatasi jarak menuju sekolah, kekurangan guru, kebutuhan membantu ekonomi keluarga, atau biaya tinggal di luar desa. Kerentanan bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan akumulasi hambatan yang saling memperkuat (Bappenas, BPS, & UNICEF, 2024; BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025b).

Persamaan kedua kasus terlihat pada pola penurunan partisipasi ketika anak memasuki usia pendidikan menengah atas. Hampir universalnya partisipasi kelompok usia sekolah dasar menunjukkan bahwa kebijakan wajib belajar, pembiayaan operasional, dan bantuan peserta didik telah menurunkan hambatan masuk. Namun, penurunan pada kelompok 16–18 tahun mengindikasikan bahwa usia tersebut merupakan titik ketika pertimbangan ekonomi, psikososial, dan aspirasional menjadi lebih menentukan. Di DKI Jakarta, angka partisipasi sekolah kelompok 16–18 tahun sekitar 86,78%; di Nusa Tenggara Timur sekitar 75,75%. Selisih tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh preferensi keluarga. Variasi hasil dipengaruhi kedalaman kemiskinan, biaya kesempatan untuk tetap bersekolah, kepadatan satuan pendidikan, kapasitas pemerintah menyediakan tambahan bantuan, dan kemampuan sistem melakukan penjangkauan kepada anak yang mulai jarang hadir (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024; BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025a).

Mekanisme risiko pada masa transisi dapat dijelaskan melalui tiga tahapan. Pertama, tekanan ekonomi meningkatkan kebutuhan anak untuk bekerja, membantu rumah tangga, atau mengurangi pengeluaran. Kedua, ketidakhadiran sementara menurunkan keterikatan sosial dan akademik terhadap sekolah. Ketiga, ketika sekolah tidak memiliki sistem tindak lanjut yang menghubungkan keluarga dengan pelayanan sosial, ketidakhadiran berkembang menjadi putus sekolah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa putus sekolah bukan peristiwa tunggal, melainkan proses kumulatif. Intervensi yang baru diberikan setelah anak tercatat keluar dari sekolah terlambat untuk mengatasi rangkaian penyebab yang telah berkembang.

Teori ekologis membantu menjelaskan mengapa intervensi harus bekerja pada beberapa tingkat. Pada tingkat individual, anak memerlukan dukungan akademik, rasa aman, kesehatan mental, dan keyakinan bahwa pendidikan memiliki nilai bagi masa depannya. Pada tingkat keluarga, keberlanjutan sekolah dipengaruhi stabilitas pendapatan, kapasitas pengasuhan, pembagian kerja rumah tangga, dan aspirasi orang



tua. Pada tingkat sekolah, respons bergantung pada kemampuan guru mengenali perubahan perilaku dan menggunakan jalur rujukan. Pada tingkat komunitas, norma perkawinan, pekerjaan anak, disabilitas, dan gender dapat memperkuat atau mengurangi risiko. Pada tingkat kebijakan, ketepatan data, kesinambungan bantuan, dan ketersediaan layanan menentukan apakah anak memperoleh dukungan pada saat yang tepat.

Temuan ini mengoreksi asumsi bahwa peningkatan cakupan bantuan tunai secara otomatis mengurangi seluruh bentuk eksklusi pendidikan. Bantuan bekerja paling langsung terhadap biaya moneter, sedangkan keputusan bertahan di sekolah juga dipengaruhi biaya nonmoneter dan kualitas relasi. Literatur internasional memperlihatkan bahwa transfer tunai memiliki dampak lebih konsisten terhadap pendaftaran dan kehadiran daripada terhadap pembelajaran, kesejahteraan psikososial, atau mobilitas jangka panjang. Efek dari sisi permintaan juga dibatasi kualitas pasokan pendidikan (Bastagli et al., 2019; Das & Sethi, 2023). Perbandingan DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur memperluas penjelasan tersebut dengan menunjukkan bahwa variasi pasokan bukan hanya kualitas sekolah, tetapi juga jaringan pelayanan sosial, transportasi, infrastruktur data, dan kapasitas pemerintah daerah.

3.2 Kapasitas Kelembagaan dan Arsitektur Intervensi

DKI Jakarta memiliki arsitektur intervensi yang lebih berlapis. Rumah tangga rentan dapat beririsan dengan Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Program Indonesia Pintar, jaminan kesehatan, Kartu Jakarta Pintar Plus, dan bentuk bantuan daerah lainnya sesuai persyaratan yang berlaku. Keunggulan utama konfigurasi tersebut bukan hanya nilai bantuan, tetapi kemungkinan menutup beberapa komponen biaya pendidikan sekaligus. Kartu Jakarta Pintar Plus, misalnya, dirancang mencakup kebutuhan personal pendidikan dan menjangkau peserta didik pada berbagai jenjang, termasuk pendidikan kesetaraan. Cakupan 523.622 penerima pada tahap kedua 2024 menunjukkan besarnya kapasitas daerah untuk menambahkan instrumen di luar program nasional (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024).

Kapasitas tersebut didukung oleh kedekatan fisik antarlembaga, ketersediaan sistem administrasi yang relatif lebih berkembang, dan kemampuan fiskal daerah. Sekolah, kelurahan, dinas pendidikan, dinas sosial, fasilitas kesehatan, dan unit perlindungan anak secara geografis lebih mudah dihubungkan daripada dalam wilayah kepulauan yang luas. Kedekatan tidak menjamin koordinasi, tetapi menurunkan biaya transaksi untuk verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan kasus, dan rujukan. Ketersediaan tambahan bantuan daerah juga memberi ruang koreksi ketika cakupan program nasional belum mencukupi.

Namun, jumlah program yang lebih banyak menciptakan kompleksitas baru. Setiap program dapat menggunakan kriteria, periode pemutakhiran, prosedur verifikasi, serta organisasi pelaksana yang berbeda. Keterlambatan penyaluran Kartu Jakarta Pintar Plus pada periode tertentu memperlihatkan bahwa kemampuan fiskal tidak



menghilangkan kerentanan administratif. Bagi keluarga miskin, keterlambatan beberapa minggu atau bulan dapat memengaruhi pembelian seragam, transportasi, perlengkapan, dan pembayaran kebutuhan belajar. Dengan demikian, kesinambungan waktu merupakan bagian dari kualitas perlindungan sosial. Manfaat yang besar tetapi tidak dapat diprediksi berpotensi menghasilkan kapasitas perlindungan yang lebih rendah daripada manfaat yang lebih kecil tetapi diterima secara teratur.

Nusa Tenggara Timur memiliki konfigurasi yang berbeda. Program nasional seperti Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan Dana Alokasi Khusus menjadi komponen utama pembiayaan akses pendidikan. Arsitektur tersebut memberikan standardisasi hak dasar dan memungkinkan pemerintah pusat menyalurkan sumber daya ke daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Pada saat yang sama, ketergantungan yang tinggi terhadap program nasional membatasi fleksibilitas pemerintah daerah untuk mengompensasi biaya khusus yang muncul karena geografi. Besaran bantuan nasional tidak selalu memperhitungkan variasi biaya transportasi antarpulau, kebutuhan tinggal di dekat sekolah, atau akses menuju layanan administrasi.

Dokumen perencanaan pendidikan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan bahwa perluasan akses harus dijalankan bersamaan dengan peningkatan sarana, distribusi dan kompetensi tenaga pendidikan, tata kelola, serta dukungan bagi kelompok yang menghadapi hambatan. Hal tersebut mencerminkan masalah sisi permintaan dan penawaran yang saling terkait. Ketika sekolah menengah sulit dijangkau, peningkatan daya beli keluarga belum tentu menghasilkan partisipasi. Ketika guru atau layanan pendukung terbatas, anak yang kembali ke sekolah belum tentu memperoleh pengalaman belajar yang memadai. Efektivitas intervensi karena itu bergantung pada kemampuan menggabungkan bantuan rumah tangga dengan investasi pada satuan pendidikan dan sistem penjangkauan wilayah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023; World Bank, 2024).

Perbandingan ini menunjukkan perbedaan antara *program density* dan *service reach*. DKI Jakarta memiliki kepadatan program dan layanan lebih tinggi, tetapi masih menghadapi fragmentasi antarprogram. Nusa Tenggara Timur memiliki kepadatan layanan lebih rendah dan menghadapi biaya jangkauan yang lebih tinggi. Dalam kasus pertama, persoalan utama adalah mengintegrasikan banyak instrumen agar tidak tumpang tindih dan tidak meninggalkan kelompok tertentu. Dalam kasus kedua, persoalan utama adalah membawa manfaat dan layanan ke wilayah serta keluarga yang tersebar. Strategi kelembagaan yang sama tidak akan menghasilkan efisiensi yang setara pada kedua wilayah.

Tabel 1. Matriks Analitis Perbandingan Pekerjaan Sosial dan Pendidikan

Variabel	Kasus 1: DKI Jakarta	Kasus 2: Nusa Tenggara Timur	Bukti Empiris	Interpret asi Analitis
----------	-------------------------	------------------------------------	------------------	---------------------------



Karakteristik kelompok sasaran	Anak perkotaan miskin, hampir miskin, keluarga pekerja informal, migran, penghuni kawasan padat, dan rumah tangga dengan guncangan pendapatan	Anak perdesaan, kepulauan, keluarga miskin kronis, komunitas terpencil, serta rumah tangga dengan keterbatasan layanan dasar	Kemis kinan DKI 4,14%; kemiskinan NTT 19,02% pada September 2024	Rata-rata kemiskinan yang rendah tidak menghilangkan kerentanan perkotaan, sedangkan NTT menghadapi kerentanan yang lebih luas dan dalam
Bentuk kerentanan	Biaya hidup, perumahan, ketidakpastian kerja, pengasuhan, kesehatan mental, perundungan, dan eksklusi administratif	Kemiski nan multidimension al, jarak, transportasi, konektivitas, ketersediaan sekolah, pekerjaan anak, dan keterbatasan layanan	Depriv asi multidimensi onal anak sekitar 78,02%	NTT membutuhkan intervensi multisektor lebih intensif; DKI membutuhkan deteksi kerentanan dinamis dan tersembunyi
Akses pendidikan	Akses fisik relatif padat; kesenjangan meningkat pada usia 16–18 tahun	Akses dipengaruhi sebaran sekolah, pulau, transportasi, dan distribusi tenaga pendidikan	APS usia 16–18 tahun sekitar 86,78% di DKI dan 75,75% di NTT	Transisi pendidikan menengah merupakan titik kritis pada kedua kasus, tetapi hambatan teritorial lebih kuat di NTT



Akses pelayanan sosial	Jaringan layanan lebih dekat dan beragam, meskipun terfragmentasi	Layanan lebih tersebar dan memerlukan biaya penjangkauan lebih besar	Dokumentasi program daerah dan kajian inklusi wilayah terpencil	Kedekatan layanan menurunkan biaya koordinasi, tetapi tidak otomatis menghasilkan integrasi
Kapasitas pekerja sosial	Akses terhadap lembaga sosial dan tenaga profesional relatif lebih besar, tetapi pekerja sosial belum menjadi bagian baku dari sekolah	Tenaga lembaga harus menjangkau wilayah luas; hubungan dengan sekolah cenderung berbasis kasus atau program	UU Pekerja Sosial dan telaah dokumen program	Kedua wilayah belum memiliki model pekerjaan sosial sekolah yang terinstitusionalisasi secara menyeluruh
Kapasitas tenaga pendidikan	Kepada sekolah dan akses pelatihan lebih tinggi, tetapi beban administratif dan kompleksitas masalah perkotaan besar	Distribusi, kompetensi, dan keberlanjutan tenaga pendidikan menjadi isu penting	Statistik dan perencanaan pendidikan daerah	Kapasitas guru harus dilengkapi tenaga sosial; guru tidak dapat dibebani seluruh fungsi asesmen sosial
Model intervensi	Kombinasi program nasional dan bantuan pendidikan daerah	Dominasi program nasional dengan dukungan perencanaan dan	PIP, PKH, KJP Plus, BOS, dan DAK	DKI memiliki perlindungan lebih berlapis; NTT membutuhkan diferensiasi bantuan



		pembiayaan daerah		berdasarkan biaya geografis
Dukungan keluarga	Dipengaruhi stabilitas pekerjaan, waktu pengasuhan, struktur migrasi, dan tekanan biaya hidup	Dipengaruhi kemiskinan kronis, mata pencaharian, jarak layanan, norma sosial, dan pendidikan orang tua	Literatur bantuan tunai dan aspirasi pendidikan	Kapasitas keluarga merupakan mediator antara bantuan dan keberlanjutan pendidikan
Partisipasi masyarakat	Potensi organisasi komunitas tinggi, tetapi relasi sosial perkotaan dapat terfragmentasi	Ikatan komunitas dapat kuat, tetapi sumber daya organisasi terbatas dan wilayah tersebar	Analisis dokumen dan literatur pembangunan komunitas	Modal sosial perlu dihubungkan dengan sumber daya formal agar tidak hanya memindahkan tanggung jawab kepada komunitas
Koordinasi antarinstitusi	Secara fisik lebih mudah, tetapi basis data dan mandat program tetap terpisah	Lebih sulit karena jarak, pembagian kewenangan, dan keterbatasan infrastruktur	Dokumentasi program dan laporan pembiayaan sosial anak	Koordinasi perlu dipahami sebagai proses manajemen kasus, bukan sekadar rapat kelembagaan
Dukungan anggaran	Kapasitas APBD memungkinkan tambahan bantuan dalam skala besar	Ruang fiskal tambahan lebih terbatas dan ketergantungan pada transfer pusat lebih besar	Cakupan KJP Plus dan arsitektur pembiayaan pendidikan NTT	Desentralisasi menghasilkan ruang inovasi yang tidak sama antardaerah
Kualitas pendampingan	Peluang rujukan lebih	Penjangkauan dan	Telaah regulasi dan	Nilai bantuan tidak



	banyak, tetapi belum terintegrasi dengan bantuan pendidikan secara sistematis	kesinambungan pendampingan dibatasi jarak dan ketersediaan tenaga	dokumen implementasi	dapat menggantikan kebutuhan terhadap hubungan pendampingan
Keberlanjutan program	Didukung kapasitas fiskal, tetapi sensitif terhadap pemutakhiran data dan keputusan administratif	Program nasional memberi kesinambungan, tetapi adaptasi lokal dan jangkauan tetap menjadi tantangan	Dokumen PIP, KJP Plus, dan perencanaan daerah	Keberlanjutan mencakup kepastian waktu, validitas data, dan kesinambungan layanan
Hasil sosial	Kemiskinan dan deprivasi agregat lebih rendah, tetapi kelompok rentan perkotaan tetap berisiko	Kemiskinan dan deprivasi multidimensional lebih tinggi	Statistik kemiskinan dan pembangunan manusia	Kedalaman kerentanan memengaruhi jumlah tahapan intervensi yang dibutuhkan
Hasil pendidikan	Partisipasi lebih tinggi, terutama pada usia pendidikan menengah	Partisipasi dasar tinggi, tetapi penurunan lebih besar pada kelompok usia 16-18 tahun	Statistik Pendidikan 2024	Bantuan berlapis dan akses layanan berkontribusi, tetapi bukan satu-satunya penyebab variasi
Faktor penghambat	Fragmentasi data, birokrasi verifikasi, keterlambatan, stigma, dan	Geografi transportasi, keterbatasan layanan, kemiskinan kronis,	Sintesis seluruh dokumen	Hambatan dominan administratif-integratif; hambatan NTT



	tidak adanya manajemen kasus sekolah	konektivitas, dan sumber daya daerah		bersifat administratif, struktural, dan teritorial
Faktor pendukung	Kapasitas fiskal, kepadatan layanan, sistem administrasi, dan tambahan program daerah	Program nasional, jaringan komunitas, sekolah, pemerintah desa, serta peluang penjangkauan berbasis wilayah	Dokumen kebijakan dan literatur	Keunggulan masing-masing kasus perlu dikombinasikan dengan desain intervensi yang kontekstual

Pola utama dalam tabel memperlihatkan bahwa perbedaan hasil tidak hanya dipengaruhi banyaknya bantuan, tetapi juga kemampuan institusi mengurangi jarak antara kelayakan formal dan akses aktual. DKI Jakarta memiliki peluang lebih besar untuk membangun sistem yang cepat karena kedekatan fisik dan kapasitas anggaran. Akan tetapi, fragmentasi data dan verifikasi dapat menciptakan jarak administratif meskipun jarak geografis rendah. Nusa Tenggara Timur menghadapi jarak administratif sekaligus geografis. Seorang penerima dapat memenuhi kriteria program tetapi tetap mengalami hambatan memperoleh dokumen, memperbarui data, membuka rekening, menghadiri layanan, atau menjangkau sekolah.

Persamaan paling penting adalah belum kuatnya kelembagaan pekerjaan sosial berbasis sekolah. Dokumen program lebih banyak menempatkan sekolah sebagai pengusul, pemverifikasi, penyalur informasi, atau pemantau kehadiran, belum sebagai simpul manajemen kasus sosial. Akibatnya, informasi mengenai penerimaan bantuan tidak selalu dihubungkan dengan asesmen mengenai kekerasan, disabilitas, kesehatan mental, konflik keluarga, pekerjaan anak, atau risiko perkawinan. Kekosongan tersebut sering diisi guru kelas, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, pendamping sosial, atau relawan komunitas secara terpisah. Para aktor tersebut penting, tetapi bekerja dengan mandat, kompetensi, beban kerja, dan sistem akuntabilitas yang berbeda.

Hubungan kausal yang muncul adalah kapasitas kelembagaan memengaruhi kualitas integrasi; kualitas integrasi memengaruhi kontinuitas manfaat dan kecepatan rujukan; kontinuitas manfaat serta rujukan memengaruhi kemampuan keluarga mempertahankan kebutuhan pendidikan; dan kapasitas keluarga memengaruhi keterikatan anak terhadap sekolah. Ketika salah satu mata rantai terputus, bantuan kehilangan sebagian daya transformasinya. Anak dapat menerima bantuan tetapi tetap meninggalkan sekolah karena kekerasan, tekanan psikologis, atau jarak. Sebaliknya,



konseling dapat diberikan tanpa hasil berkelanjutan ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Implikasi teoretisnya adalah bahwa pekerjaan sosial tidak boleh ditempatkan sebagai layanan korektif setelah kegagalan pendidikan, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur pendidikan inklusif. Implikasi kebijakannya bukan sekadar menambah pekerja sosial dalam jumlah seragam, tetapi membangun fungsi sosial yang memiliki standar asesmen, prosedur rujukan, akses terhadap data, supervisi profesional, dan hubungan formal dengan pelayanan daerah. Model kelembagaan dapat berbeda: pekerja sosial ditempatkan di gugus sekolah di wilayah padat, sedangkan di wilayah terpencil dapat dibentuk tim bergerak berbasis kecamatan atau kabupaten.

3.3 Koordinasi Lintas Sektor, Data, dan Manajemen Kasus

Koordinasi lintas sektor merupakan mekanisme yang membedakan keberadaan banyak program dari terbentuknya sistem perlindungan yang utuh. Dalam sistem yang terfragmentasi, setiap organisasi dapat mencapai indikator internalnya tanpa menghasilkan perubahan pada kehidupan anak. Dinas pendidikan dapat mencatat peningkatan penyaluran bantuan, dinas sosial mencatat kepesertaan keluarga, dan sekolah mencatat kehadiran, sementara penyebab ketidakhadiran berulang tidak tertangani. Integrasi menuntut agar informasi tersebut dibaca sebagai rangkaian risiko yang sama.

Di DKI Jakarta, integrasi secara teknis lebih memungkinkan karena tingginya penggunaan sistem digital dan kedekatan organisasi. Namun, digitalisasi juga dapat menciptakan eksklusi baru ketika data kependudukan, data kesejahteraan, dan data pendidikan tidak selaras. Perubahan alamat, status keluarga, sekolah, atau kondisi pekerjaan dapat menyebabkan anak tertahan dalam proses verifikasi. Keluarga dengan literasi administratif rendah menanggung biaya untuk membuktikan kemiskinannya berulang kali. Dalam situasi demikian, digitalisasi hanya memindahkan antrean dari kantor pelayanan menuju prosedur elektronik tanpa pendampingan.

Keterlambatan penyaluran Kartu Jakarta Pintar Plus pada tahap tertentu karena verifikasi menunjukkan adanya dilema antara ketepatan sasaran dan kecepatan perlindungan. Verifikasi diperlukan untuk mencegah salah sasaran, tetapi prosedur yang panjang dapat menciptakan kerugian bagi penerima yang benar-benar membutuhkan. Solusinya bukan menghapus verifikasi, melainkan membedakan kasus berdasarkan tingkat risiko. Anak yang telah menerima bantuan, masih terdaftar di sekolah, dan tidak mengalami perubahan material seharusnya dapat memperoleh kesinambungan manfaat dengan verifikasi minimal, sedangkan perubahan signifikan diperiksa lebih mendalam. Pendekatan berbasis risiko ini mengurangi beban administrasi tanpa menghilangkan akuntabilitas.

Di Nusa Tenggara Timur, integrasi data harus berhadapan dengan keterbatasan konektivitas, mobilitas penduduk, jarak menuju layanan, dan kapasitas operator. Pemutakhiran yang bergantung sepenuhnya pada pengisian digital berpotensi



mengecualikan keluarga paling terpencil. Karena itu, penjangkauan aktif melalui sekolah, pemerintah desa, pendamping sosial, fasilitas kesehatan, organisasi keagamaan, dan kelompok komunitas menjadi lebih penting. Mekanisme tersebut tidak boleh sekadar mengumpulkan dokumen, tetapi juga memvalidasi situasi sosial yang sulit direpresentasikan dalam kategori administratif.

Analisis ini mendukung kritik McCarthy et al. (2024) bahwa sistem pengukuran kemiskinan turut membentuk realitas kebijakan. Ketika kelayakan didasarkan pada variabel yang terbatas, institusi lebih mudah mengenali rumah tangga yang cocok dengan kategori program daripada anak yang menghadapi kombinasi kerentanan baru. Contohnya adalah keluarga yang tidak tergolong miskin ekstrem, tetapi mengalami penyakit, perceraian, kekerasan, atau kehilangan pendapatan mendadak. Sistem data periodik cenderung terlambat menangkap perubahan tersebut. Manajemen kasus dapat melengkapi data agregat dengan penilaian profesional terhadap dinamika keluarga.

Manajemen kasus dalam pekerjaan sosial mencakup identifikasi, asesmen, perencanaan intervensi, penghubungan layanan, pemantauan, evaluasi, dan terminasi. Dalam lingkungan pendidikan, pemicu asesmen dapat berupa ketidakhadiran berulang, perubahan prestasi yang tajam, masalah perilaku, tanda kekerasan, kebutuhan bekerja, atau pernyataan ingin berhenti sekolah. Informasi tersebut perlu ditangani dengan prinsip kerahasiaan dan kepentingan terbaik anak. Wali kelas dan guru bimbingan dan konseling dapat menjadi pendeteksi awal, tetapi asesmen sosial mendalam seharusnya dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial atau bekerja dalam tim multidisipliner.

Perbedaan kelembagaan kedua kasus mengharuskan desain berbeda. DKI Jakarta dapat mengembangkan pekerja sosial berbasis gugus sekolah yang melayani beberapa satuan pendidikan dalam radius tertentu. Struktur ini memanfaatkan kepadatan sekolah dan kedekatan layanan. Nusa Tenggara Timur dapat menggunakan tim sosial-pendidikan bergerak pada tingkat kecamatan atau kabupaten, dengan jadwal kunjungan, dukungan jarak jauh saat tersedia, dan kemitraan bersama pemerintah desa serta organisasi komunitas. Dalam wilayah sangat terpencil, pelatihan deteksi dini bagi guru dan kader perlu disertai akses konsultasi profesional; pelatihan tanpa jaringan rujukan hanya memindahkan tanggung jawab kepada aktor lokal.

Koordinasi juga membutuhkan kesepakatan mengenai hasil bersama. Selama dinas sosial dinilai berdasarkan penyaluran dan dinas pendidikan dinilai berdasarkan kepesertaan, insentif untuk melakukan pekerjaan lintas sektor tetap lemah. Indikator bersama dapat mencakup keberhasilan transisi dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas, penurunan ketidakhadiran kronis, penyelesaian kasus kekerasan, pemulihan anak yang kembali bersekolah, dan keberlanjutan pendidikan penerima bantuan. Indikator tersebut mengalihkan orientasi dari keluaran administratif menuju perubahan kehidupan anak.

3.4 Peran Keluarga, Komunitas, dan Dukungan Psikososial



Perlindungan sosial bekerja melalui keluarga. Bantuan pendidikan biasanya diterima, dikelola, atau dipengaruhi keputusan rumah tangga, sedangkan keputusan anak untuk bertahan di sekolah dibentuk melalui interaksi sehari-hari dengan orang tua dan anggota keluarga. Karena itu, kapasitas keluarga merupakan variabel mediasi, bukan sekadar latar belakang. Keluarga yang memperoleh bantuan tetapi tetap mengalami konflik, kekerasan, penyakit, atau beban utang mungkin tidak mampu mengubah transfer menjadi dukungan pendidikan yang stabil.

Dalam konteks DKI Jakarta, jam kerja panjang, pekerjaan informal, perjalanan komuter, kepadatan tempat tinggal, dan struktur keluarga migran dapat membatasi keterlibatan orang tua. Ketidakhadiran orang tua dalam pertemuan sekolah tidak selalu menandakan rendahnya kepedulian, melainkan dapat mencerminkan biaya kehilangan pendapatan atau ketidakfleksibelan pekerjaan. Program yang menilai partisipasi hanya melalui kehadiran fisik berisiko menyalahkan keluarga atas kondisi struktural. Pekerjaan sosial dapat membantu sekolah mengembangkan bentuk keterlibatan yang lebih fleksibel, seperti komunikasi terjadwal, kunjungan rumah berbasis risiko, kelompok dukungan, dan mediasi dengan pemberi kerja atau layanan sosial.

Di Nusa Tenggara Timur, partisipasi keluarga dipengaruhi mata pencaharian, jarak, pendidikan orang tua, norma komunitas, serta distribusi pekerjaan rumah tangga. Pada sebagian konteks, anak dapat dipandang sebagai sumber kontribusi ekonomi atau tenaga keluarga. Keputusan melanjutkan sekolah menengah juga dipengaruhi biaya tinggal, transportasi, persepsi manfaat pendidikan, dan keamanan anak yang harus bersekolah di luar desa. Intervensi yang hanya menyampaikan pentingnya pendidikan tanpa mengurangi biaya dan risiko aktual akan menghasilkan perubahan terbatas. Pendampingan keluarga perlu menggabungkan perencanaan ekonomi, informasi jalur pendidikan, perlindungan anak, dan pemetaan sumber dukungan komunitas.

Temuan Hartarto dan Wardani (2023) bahwa bantuan tunai dapat memengaruhi aspirasi pendidikan perlu dibaca melalui proses relasional. Aspirasi tidak dibentuk hanya oleh informasi mengenai bantuan, tetapi juga oleh contoh keberhasilan di komunitas, harapan guru, dukungan orang tua, pengalaman diskriminasi, dan persepsi terhadap peluang kerja. Ketika anak melihat lulusan sekolah tetap menganggur atau tidak memiliki jalur menuju pendidikan tinggi dan pekerjaan layak, insentif untuk bertahan di sekolah melemah. Dengan demikian, kesinambungan pendidikan menengah perlu dikaitkan dengan bimbingan karier, pendidikan vokasional, beasiswa lanjutan, dan hubungan dengan pasar kerja.

Komunitas dapat memperkuat intervensi melalui identifikasi dini, dukungan transportasi, pengawasan perlindungan anak, ruang belajar, dan perubahan norma. Namun, pelibatan komunitas tidak boleh digunakan untuk menggantikan tanggung jawab negara. Konsep pemberdayaan berbeda dari devolusi beban. Pemberdayaan terjadi ketika komunitas memperoleh akses terhadap informasi, kewenangan, sumber daya, dan mekanisme untuk memengaruhi keputusan. Sebaliknya, meminta kader atau



relawan menangani kasus kompleks tanpa pelatihan, supervisi, perlindungan, dan dukungan anggaran merupakan pemindahan tanggung jawab.

Dukungan psikososial merupakan komponen yang paling lemah terlihat dalam arsitektur bantuan pendidikan pada kedua kasus. Program umumnya memiliki indikator kelayakan dan kepatuhan, tetapi tidak selalu dilengkapi prosedur untuk menilai stres, depresi, perundungan, kekerasan, kehilangan, atau kecemasan pendidikan. Padahal, masalah psikososial dapat mengurangi konsentrasi, kehadiran, keterlibatan, dan rasa memiliki terhadap sekolah. Bantuan ekonomi dapat menurunkan sebagian stres keluarga, tetapi tidak menggantikan intervensi relasional dan terapeutik.

Pekerjaan sosial berbasis sekolah dapat menggabungkan intervensi universal dan terarah. Pada tingkat universal, pekerja sosial mendukung kebijakan perlindungan anak, pendidikan anti-perundungan, literasi kesehatan mental, dan penguatan iklim sekolah. Pada tingkat selektif, kelompok anak berisiko memperoleh dukungan kelompok, mentoring, dan pemantauan kehadiran. Pada tingkat intensif, anak dan keluarga memperoleh manajemen kasus, intervensi krisis, kunjungan rumah, serta rujukan ke layanan kesehatan, perlindungan, hukum, atau bantuan sosial. Model bertingkat mencegah pekerja sosial hanya menangani krisis dan memungkinkan sekolah membangun lingkungan yang lebih preventif (Ding et al., 2023).

3.5 Dampak Intervensi terhadap Kesejahteraan dan Keberlanjutan Pendidikan

Capaian partisipasi pendidikan DKI Jakarta yang lebih tinggi dapat dipahami sebagai hasil kumulatif dari tingkat kemiskinan yang lebih rendah, akses fisik yang lebih luas, kapasitas fiskal, dan keberadaan bantuan pendidikan daerah. Namun, hubungan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa satu program tertentu secara tunggal menyebabkan perbedaan. Data agregat tidak memungkinkan isolasi efek Kartu Jakarta Pintar Plus dari Program Indonesia Pintar, kondisi pasar kerja, ketersediaan sekolah, pendidikan orang tua, dan faktor lainnya. Temuan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa DKI Jakarta memiliki konfigurasi yang lebih mendukung konversi bantuan menjadi partisipasi pendidikan.

Sebaliknya, angka partisipasi kelompok usia 16–18 tahun yang lebih rendah di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa program nasional belum sepenuhnya mengompensasi kedalaman dan kompleksitas hambatan. Ini tidak berarti bantuan gagal. Tanpa Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, pembiayaan operasional sekolah, dan transfer antarpemerintah, tingkat eksklusi kemungkinan lebih tinggi. Persoalannya adalah adanya batas dampak bantuan ketika hambatan pendidikan mencakup jarak, kualitas layanan, distribusi guru, kebutuhan bekerja, dan kapasitas keluarga. Temuan ini konsisten dengan kajian transfer tunai yang menunjukkan bahwa dampak terhadap modal manusia bergantung pada pasokan pelayanan dan kondisi implementasi (Cahyadi et al., 2020; Das & Sethi, 2023).

Hasil sosial jangka pendek dari bantuan meliputi berkurangnya tekanan pengeluaran, meningkatnya kemampuan membeli perlengkapan, dan terjaganya



kehadiran. Hasil jangka menengah mencakup transisi antartingkat pendidikan, berkurangnya kebutuhan anak bekerja, peningkatan aspirasi, dan penguatan relasi anak dengan sekolah. Hasil jangka panjang berupa penyelesaian pendidikan, peningkatan kapabilitas, mobilitas sosial, dan pemutusan transmisi kemiskinan antargenerasi. Setiap tahap memerlukan mekanisme berbeda. Transfer tunai relatif kuat pada tahap awal, sedangkan tahap menengah dan panjang membutuhkan kualitas pembelajaran, dukungan psikososial, orientasi masa depan, dan akses terhadap pendidikan lanjutan atau pekerjaan.

Kesejahteraan anak tidak boleh direduksi menjadi status bersekolah. Anak dapat terdaftar tetapi mengalami ketidakhadiran kronis, kekerasan, kecemasan, ketertinggalan belajar, atau diskriminasi. Oleh karena itu, indikator efektivitas integrasi perlu mencakup keamanan, partisipasi bermakna, kesehatan mental, hubungan sosial, dan kemampuan menyuarakan kebutuhan. Pendekatan ini sejalan dengan pembangunan kapabilitas, yang menilai bukan hanya kepemilikan sumber daya, tetapi kebebasan substantif untuk menggunakan sumber daya tersebut dalam menjalani kehidupan yang dihargai (Sen, 1999).

Variasi hasil kedua kasus juga mengungkap paradoks desentralisasi. Desentralisasi memberi ruang inovasi dan adaptasi, tetapi kemampuan memanfaatkan ruang tersebut bergantung pada kapasitas fiskal dan administratif. DKI Jakarta mampu membangun bantuan pendidikan daerah dalam skala besar, sedangkan daerah dengan kebutuhan lebih dalam dapat memiliki sumber daya lebih terbatas untuk menciptakan tambahan serupa. Tanpa mekanisme afirmatif nasional, desentralisasi berpotensi menghasilkan “ketimpangan perlindungan”, yakni hak anak terhadap dukungan pendidikan dipengaruhi tempat tinggalnya.

Implikasinya bukan menyeragamkan seluruh program daerah, melainkan membangun standar layanan minimum yang didukung pembiayaan afirmatif. Pemerintah pusat dapat menetapkan fungsi inti integrasi – deteksi dini, manajemen kasus, penjangkauan aktif, rujukan, dan pemantauan transisi – sementara pemerintah daerah menyesuaikan bentuk organisasinya. Besaran bantuan juga perlu mempertimbangkan indeks biaya akses dan kedalaman deprivasi, bukan hanya kategori jenjang pendidikan.

Keberlanjutan program harus dinilai dari ketahanan sistem menghadapi perubahan. Program yang sangat bergantung pada keputusan tahunan, pergantian kepemimpinan, atau proses verifikasi manual berisiko mengalami diskontinuitas. Keberlanjutan memerlukan dasar regulasi, anggaran berjangka, interoperabilitas data, tenaga profesional, dan mekanisme pengaduan. Di tingkat penerima manfaat, keberlanjutan berarti keluarga dapat memprediksi kapan dukungan diterima dan mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika terjadi masalah.

3.6 Implikasi bagi Praktik Pekerjaan Sosial, Pendidikan, dan Kebijakan Sosial



Temuan penelitian menunjukkan perlunya mengubah posisi sekolah dari penerima informasi program menjadi simpul perlindungan sosial anak. Sekolah memiliki interaksi paling rutin dengan anak dan dapat mengenali perubahan sebelum data kemiskinan diperbarui. Namun, fungsi ini harus dilaksanakan dengan batas profesional yang jelas. Guru bertanggung jawab terhadap proses pendidikan dan deteksi awal, sedangkan asesmen sosial, intervensi keluarga kompleks, dan koordinasi layanan perlu didukung pekerja sosial atau tim multidisipliner.

Bagi praktik pekerjaan sosial, intervensi perlu bergerak dari model reaktif menuju preventif. Pekerja sosial tidak hanya dipanggil ketika anak telah putus sekolah atau mengalami kasus perlindungan berat. Mereka perlu terlibat dalam analisis ketidakhadiran, perencanaan transisi jenjang, pendampingan keluarga penerima bantuan, dan penguatan kebijakan sekolah. Akses terhadap data harus diberikan secara proporsional dengan perlindungan kerahasiaan, persetujuan yang sesuai, dan prinsip kepentingan terbaik anak.

Bagi sistem pendidikan, indikator anak berisiko perlu dikembangkan tanpa menghasilkan stigma. Sistem dapat menggunakan kombinasi ketidakhadiran, perubahan prestasi, transisi yang tertunda, masalah administrasi, dan laporan kesejahteraan. Algoritma atau daftar risiko tidak boleh digunakan untuk melabeli anak, melainkan memicu peninjauan manusia dan tawaran dukungan. Keluarga juga harus memiliki hak untuk memahami, memperbaiki, dan mengajukan keberatan terhadap data.

Bagi DKI Jakarta, prioritas kebijakan terletak pada integrasi program yang telah tersedia. Pemerintah daerah dapat membangun protokol satu asesmen untuk beberapa layanan, kesinambungan manfaat bagi kasus stabil, serta tim pekerja sosial berbasis gugus sekolah. Penguatan pengaduan dan pendampingan administratif diperlukan agar digitalisasi tidak mengecualikan keluarga dengan literasi rendah. Evaluasi Kartu Jakarta Pintar Plus sebaiknya tidak berhenti pada penyaluran dan kepesertaan, tetapi mengukur transisi pendidikan, ketidakhadiran kronis, kesejahteraan, dan penyelesaian kasus.

Bagi Nusa Tenggara Timur, prioritas terletak pada strategi penjangkauan teritorial dan pembiayaan yang sensitif terhadap jarak. Tim bergerak sosial-pendidikan dapat dibentuk pada tingkat kabupaten atau kecamatan, dengan sekolah dan pemerintah desa sebagai simpul identifikasi. Bantuan perlu dikombinasikan dengan transportasi, dukungan tempat tinggal aman, penguatan pendidikan menengah, dan layanan untuk anak yang kembali bersekolah. Teknologi dapat mendukung koordinasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya pintu akses.

Pada tingkat nasional, Program Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan perlu dihubungkan melalui jalur data dan rujukan yang berorientasi pada anak. Status penerima tidak harus identik karena tujuan program berbeda, tetapi ketidaksesuaian data perlu memicu pemeriksaan, bukan penolakan otomatis. Pemerintah pusat juga perlu mengembangkan standar kompetensi dan skema pembiayaan pekerjaan sosial



berbasis sekolah, termasuk model gugus sekolah dan tim bergerak untuk konteks geografis berbeda.

4. Model Konseptual

Berdasarkan temuan komparatif, penelitian ini mengembangkan **Model Kapasitas Integrasi Sosial-Pendidikan** dengan hubungan sebagai berikut:

Kapasitas kelembagaan → integrasi data dan koordinasi lintas sektor → kontinuitas perlindungan sosial serta manajemen kasus → kapasitas keluarga dan dukungan psikososial → keterikatan terhadap sekolah → keberlanjutan pendidikan → kesejahteraan anak dan pembangunan manusia.

Variabel independen utama dalam model adalah kapasitas kelembagaan, yang meliputi kapasitas fiskal, tenaga profesional, jaringan pelayanan, infrastruktur administrasi, kepemimpinan, dan kemampuan penjangkauan. Kapasitas tersebut tidak memengaruhi hasil pendidikan secara langsung. Pengaruhnya dimediasi oleh integrasi data dan koordinasi lintas sektor. Daerah dengan sumber daya besar tetap dapat menghasilkan pelayanan terfragmentasi ketika organisasi tidak berbagi tujuan, informasi, dan tanggung jawab.

Mediator kedua adalah kontinuitas perlindungan sosial dan manajemen kasus. Kontinuitas merujuk pada ketepatan waktu, kepastian, dan kemampuan program merespons perubahan kondisi keluarga. Manajemen kasus menambahkan dimensi relasional yang tidak dimiliki mekanisme transfer. Melalui asesmen, rujukan, dan pemantauan, bantuan ekonomi dihubungkan dengan layanan keluarga, kesehatan mental, perlindungan anak, disabilitas, dan pendidikan.

Kapasitas keluarga dan dukungan psikososial menjadi mediator ketiga. Bantuan yang tepat waktu dapat mengurangi tekanan ekonomi, tetapi dampaknya terhadap pendidikan bergantung pada kemampuan keluarga menciptakan lingkungan pengasuhan yang mendukung serta kemampuan anak mempertahankan rasa aman, harapan, dan keterikatan terhadap sekolah. Keterikatan sekolah merupakan kondisi proksimal sebelum keberlanjutan pendidikan; anak yang merasa diterima dan didukung lebih mungkin bertahan meskipun menghadapi tekanan.

Hubungan dalam model dimoderasi oleh kondisi geografis, kedalaman kemiskinan, kualitas satuan pendidikan, akses digital, norma sosial, dan kapasitas fiskal daerah. Geografi terpencil memperlemah hubungan antara ketersediaan bantuan dan pemanfaatan layanan apabila tidak ada penjangkauan. Kemiskinan multidimensional memperlemah dampak intervensi tunggal karena keluarga menghadapi beberapa hambatan secara simultan. Sebaliknya, partisipasi komunitas, kepemimpinan sekolah, dan jaringan layanan yang kuat memperbesar kemampuan sistem mengonversi sumber daya menjadi hasil.

Pada DKI Jakarta, kapasitas fiskal dan kepadatan layanan memperkuat tahap awal model, tetapi fragmentasi data dan lemahnya manajemen kasus dapat menghambat konversi program menjadi dukungan holistik. Pada Nusa Tenggara Timur, hambatan



muncul sejak tahap akses dan penjangkauan, sehingga hubungan antara program dan hasil lebih bergantung pada adaptasi geografis serta dukungan sisi penawaran. Model ini menjelaskan mengapa replikasi program bantuan daerah tanpa memperhitungkan kondisi kelembagaan tidak akan menghasilkan capaian yang sama.

Kontribusi model terhadap literatur adalah pemisahan analitis antara kapasitas programatik dan kapasitas integratif. Kapasitas programatik menjawab berapa banyak program, penerima, dan anggaran. Kapasitas integratif menjawab sejauh mana program mampu mengikuti lintasan masalah anak, menghubungkan aktor, dan mempertahankan dukungan sampai terjadi perubahan. Model tersebut dapat diuji lebih lanjut melalui penelitian longitudinal, evaluasi realistis, atau metode campuran pada tingkat anak, keluarga, sekolah, dan wilayah.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana variasi kerentanan, kapasitas kelembagaan, arsitektur perlindungan sosial, dan koordinasi pekerjaan sosial-pendidikan memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak rentan di DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan capaian pendidikan kedua provinsi tidak dapat dijelaskan hanya melalui ketersediaan bantuan atau tingkat kemiskinan. Perbedaan tersebut dihasilkan oleh konfigurasi yang lebih kompleks antara kedalaman deprivasi, kapasitas fiskal, jangkauan pelayanan, kondisi geografis, kesinambungan bantuan, kemampuan administrasi, dan kapasitas menghubungkan sekolah dengan pelayanan sosial.

DKI Jakarta memiliki arsitektur perlindungan yang lebih berlapis melalui kombinasi program nasional dan bantuan pendidikan daerah. Kapasitas fiskal, kepadatan sekolah, kedekatan layanan, dan infrastruktur administratif memberikan kondisi yang lebih mendukung keberlanjutan pendidikan. Kondisi tersebut tercermin dalam tingkat partisipasi kelompok usia 16–18 tahun yang lebih tinggi dibandingkan Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian, keunggulan programatik DKI Jakarta belum sepenuhnya menjadi kapasitas integratif. Fragmentasi basis data, prosedur verifikasi, keterlambatan penyaluran, dan belum terlembaganya manajemen kasus berbasis sekolah menunjukkan bahwa banyaknya program tidak selalu menghasilkan pelayanan yang utuh.

Nusa Tenggara Timur menghadapi kerentanan yang lebih mendalam dan multidimensional. Kemiskinan tinggi berinteraksi dengan jarak, transportasi, sebaran kepulauan, keterbatasan konektivitas, distribusi tenaga pendidikan, dan akses terhadap sekolah menengah. Program nasional berperan penting menurunkan hambatan ekonomi, tetapi pengaruhnya dibatasi masalah sisi penawaran dan biaya akses yang tidak sepenuhnya tercakup dalam desain bantuan. Oleh karena itu, kesenjangan hasil bukan bukti sederhana atas kegagalan program, melainkan tanda bahwa transfer yang seragam beroperasi dalam kondisi konversi yang sangat berbeda.

Mekanisme sosial utama yang ditemukan adalah peran kapasitas keluarga dan keterikatan anak terhadap sekolah. Bantuan mengurangi sebagian tekanan ekonomi,



tetapi keberlanjutan pendidikan bergantung pada stabilitas pengasuhan, aspirasi, kesehatan psikososial, keamanan, dukungan orang tua, dan persepsi anak terhadap masa depan pendidikan. Mekanisme kelembagaan utamanya adalah integrasi data, penjangkauan, kontinuitas manfaat, koordinasi rujukan, dan manajemen kasus. Ketika mekanisme tersebut bekerja, bantuan dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan keluarga. Ketika tidak bekerja, intervensi cenderung berhenti pada transaksi administratif.

Kontribusi teoretis penelitian terletak pada Model Kapasitas Integrasi Sosial-Pendidikan. Model tersebut menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan tidak memengaruhi hasil pendidikan secara langsung, tetapi melalui koordinasi, kontinuitas perlindungan, manajemen kasus, kapasitas keluarga, dan keterikatan sekolah. Model ini membedakan kapasitas programatik dari kapasitas integratif. Daerah dapat memiliki cakupan program besar tanpa kemampuan mengikuti lintasan risiko anak; sebaliknya, inovasi koordinasi dapat meningkatkan nilai sosial bantuan meskipun sumber dayanya lebih terbatas.

Secara empiris, perbandingan memperlihatkan bahwa masalah utama DKI Jakarta bersifat administratif-integratif, sedangkan Nusa Tenggara Timur menghadapi kombinasi hambatan administratif, struktural, dan teritorial. Perbedaan tersebut menuntut diferensiasi desain. DKI Jakarta memerlukan penggabungan asesmen, interoperabilitas data, kesinambungan manfaat, dan pekerja sosial pada gugus sekolah. Nusa Tenggara Timur memerlukan penjangkauan berbasis wilayah, tim sosial-pendidikan bergerak, pembiayaan sensitif terhadap jarak, dukungan transportasi atau tempat tinggal, dan kemitraan formal dengan pemerintah desa serta komunitas.

Bagi praktik pekerjaan sosial, temuan menegaskan bahwa pekerja sosial perlu ditempatkan sebagai bagian dari infrastruktur pendidikan preventif, bukan hanya sebagai pelaksana rehabilitasi setelah anak mengalami krisis. Fungsi utamanya meliputi deteksi dini, asesmen ekologis, pendampingan keluarga, advokasi, intervensi psikososial, pengorganisasian komunitas, dan koordinasi rujukan. Bagi pendidikan, sekolah perlu memiliki indikator risiko yang etis, prosedur tindak lanjut, serta pembagian peran yang mencegah guru menanggung seluruh fungsi sosial.

Implikasi kebijakan sosial menunjukkan perlunya standar nasional fungsi integrasi sosial-pendidikan yang dapat diadaptasi oleh daerah. Pemerintah pusat perlu menyediakan pembiayaan afirmatif agar hak anak terhadap dukungan tidak terlalu ditentukan kapasitas fiskal tempat tinggalnya. Evaluasi program juga perlu bergeser dari indikator penyaluran menuju hasil seperti transisi jenjang, ketidakhadiran kronis, kembalinya anak ke sekolah, kesejahteraan psikososial, dan keberhasilan penyelesaian kasus.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder agregat. Analisis tidak dapat mengidentifikasi efek kausal individual, kualitas hubungan antara pendamping dan keluarga, pengalaman subjektif anak, atau variasi antarkabupaten, kota, dan sekolah. Data agregat juga dapat menyembunyikan kelompok kecil dengan kerentanan berat. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan studi longitudinal, evaluasi realistis, dan metode campuran yang melibatkan anak, keluarga, guru, pekerja sosial,



pemerintah daerah, serta organisasi komunitas. Pengujian model juga perlu dilakukan pada wilayah perkotaan sekunder, kepulauan, perbatasan, dan daerah dengan kapasitas fiskal menengah.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan anak rentan tidak dapat dicapai dengan memisahkan kebijakan pendidikan dari perlindungan sosial. Bantuan tunai penting, tetapi dampak pembangunan manusianya bergantung pada institusi yang mampu melihat anak secara utuh, merespons perubahan keluarga, menghubungkan pelayanan, dan mempertahankan dukungan sepanjang transisi pendidikan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan kepada Badan Pusat Statistik, kementerian terkait, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta lembaga nasional dan internasional yang menyediakan statistik, dokumen kebijakan, dan laporan program secara terbuka. Apresiasi juga disampaikan kepada pengelola satuan pendidikan, pekerja sosial, pendamping sosial, organisasi masyarakat, dan komunitas yang praktik serta dokumentasi kelembagaannya memperkaya pemahaman mengenai perlindungan dan pendidikan anak rentan. Penulis turut berterima kasih kepada kolega akademik dan para penelaah yang memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan kerangka analitis artikel ini.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, & UNICEF. (2024). *Multidimensional child rights deprivation analysis in Indonesia: Policy brief*. UNICEF Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi DKI Jakarta 2024*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Profil kemiskinan Provinsi DKI Jakarta September 2024*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025a). *Statistik pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025b). *Persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur September 2024 turun menjadi 19,02 persen*.
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T., & Pellerano, L. (2019). The impact of cash transfers: A review of the evidence from low- and middle-income countries. *Journal of Social Policy*, 48(3), 569–594.
<https://doi.org/10.1017/S0047279418000715>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.



- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110.
<https://doi.org/10.1257/pol.20190245>
- Das, A., & Sethi, N. (2023). Cash transfers and human capital outcomes of children in LMICs: A systematic review using PRISMA. *Heliyon*, 9(4), e14758.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14758>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Rencana strategis perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019–2023*.
- Ding, X., Lightfoot, E., Berkowitz, R., Guz, S., Franklin, C., & DiNitto, D. M. (2023). Characteristics and outcomes of school social work services: A scoping review of published evidence 2000–June 2022. *School Mental Health*, 15(3), 787–811.
<https://doi.org/10.1007/s12310-023-09584-z>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hadna, A. H., & Kartika, D. (2017). Evaluation of poverty alleviation policy: Can conditional cash transfers improve the academic performance of poor students in Indonesia? *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1295548. <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1295548>
- Hartarto, R. B., & Wardani, D. T. K. (2023). Does conditional cash transfer change educational aspirations? Evidence from Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 50(1), 148–161. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2021-0671>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Dorong transparansi, Kemendikdasmen wajikan sekolah mengumumkan penerima Program Indonesia Pintar*.
- McCarthy, J., Nooteboom, G., Hadi, S., Kutaneegara, P. M., & Muliati, N. (2024). The politics of knowledge and social cash transfers: The constitutive effects of an anti-poverty regime in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 54(4), 549–572.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2217820>
- McLaren, H. J., Qonitah, N., & Widianingsih, I. (2022). Incentive-based social welfare administration in Indonesia: Implications for sustainable development in women's and children's protection. *International Social Work*, 65(3), 510–524.
<https://doi.org/10.1177/0020872820930265>
- Midgley, J. (2014). *Social development: Theory and practice*. SAGE Publications.
- Olken, B. A. (2019). Designing anti-poverty programs in emerging economies in the 21st century: Lessons from Indonesia for the world. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 319–339. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690411>
- Payne, M. (2020). *Modern social work theory* (5th ed.). Oxford University Press.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Disdik DKI Jakarta pastikan dana KJP Plus dan KJMU tahap II disalurkan secara bertahap mulai 6 Desember 2024*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak*.



- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Sutiyo. (2023). A neo-institutional analysis of social protection: Insights from Indonesia. *Global Social Policy*, 23(2), 268–285. <https://doi.org/10.1177/14680181221144559>
- UNESCO. (2024). *Global education monitoring report 2024/5: Leadership in education—Lead for learning*. UNESCO.
- UNICEF Indonesia. (2025). *Summary budget brief: Social sector financing for children in Indonesia*. UNICEF.
- World Bank. (2021). *Embracing diversity and inclusion in Indonesian schools: Challenges and policy options for the future of inclusive education*. World Bank.
- World Bank. (2024). *Social protection inclusion in Indonesia's remote areas: Identifying and addressing gaps and challenges*. World Bank.